

ANALISIS PENERAPAN SMK3 PADA PT INDONESIA POWER UBP MRICA BANJARNEGARA

Chellsy Allison¹, Heru Prastawa²

Departemen Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH. Semarang 50275

Telp. (024) 7460052

E-mail: allisonchellsy@gmail.com¹; heru.prastawa@gmail.com²

Abstrak

Angka kecelakaan kerja naik sekitar 5% - 10% setiap tahunnya disebabkan oleh rendahnya kesadaran akan penerapan sistem K3 di kalangan industri. PT Indonesia Power UP Mrica adalah salah satu perusahaan pembangkit listrik bertenaga air yang mempunyai risiko tinggi dalam kecelakaan kerja. PT IP UP Mrica sudah menetapkan SMK3 pada perusahaan tetapi masih terdapat kekurangan dalam penerapannya. Hal ini dapat menyebabkan munculnya potensi kecelakaan kerja. Penerapan SMK3 pada PT IP UP Mrica sudah dapat dikatakan terorganisir, tetapi terdapat beberapa poin dalam Review Evaluasi Efektifitas SMK3 yang tidak terpenuhi karena kurangnya evidence atau evidence dianggap tidak layak karena belum diperbarui. Pada hasil checklist ditemukan 11 poin yang tidak memenuhi persyaratan. Total persen pemenuhan pada keamanan bekerja dalam SMK3 adalah 76%. Untuk lebih mengoptimalkan penerapan SMK3 para pegawai harus mampu bekerja sama dalam mengimplementasikan kedalam kegiatan bekerja dan sebaiknya dilakukan sertifikasi OHSAS 18001 agar citra perusahaan semakin baik dan karyawan selalu terjamin akan keselamatan dan kesehatannya

Kata kunci: Sistem Manajemen K3, Penerapan SMK3, Keselamatan Kerja

Abstract

[Analysis Implementation of Occupational Health and Safety Management System at PT Indonesia Power UBP Mrica Banjarnegara] The number of occupational accidents increases by around 5% - 10% every year due to the low awareness of the application of the occupational health and safety system in the industry. PT Indonesia Power UP Mrica is one of the water-powered generator companies that has a high risk of work accidents. PT IP UP Mrica has implemented occupational health and safety (OHS) management system in companies but there are still deficiencies in its application. This can cause potential work accidents. The implementation of SMK3 at PT IP UP Mrica is already organized, but there are several points in the Review of the OHS Management System Effectiveness Evaluation that are not accomplished because of lack of evidence or evidence deemed inappropriate because it has not been updated. The checklist found 11 points that did not meet the requirements. The total percent of compliance with the security of working in SMK3 is 76%. To further optimize the implementation of SMK3 employees must be able to work together in implementing it into work activities and OHSAS 18001 certification should be carried out so that the company image is better and employees are always guaranteed of their safety and health

Kata kunci: OHS Management System, Implementation OHSMS, Occupational Safety

1. Pendahuluan

Kecelakaan menurut Suma'mur (1999) adalah kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan. Dengan adanya kecelakaan kerja maka aktivitas dalam perusahaan akan terhambat dan produktivitas terganggu. Untuk menangani dan menanggulangi bahaya dalam tempat kerja maka menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 50 tahun 2012 tentang penerapan system manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Peningkatan an gka kecelakaan kerja sekitar 5%-10% setiap tahunnya. Penyebab utama kenaikan jumlah

kecelakaan kerja di Indonesia adalah rendahnya kesadaran akan penerapan sistem K3 di kalangan industri.

PT Indonesia Power Unit Pembangkitan Mrica adalah salah satu perusahaan pembangkit listrik yang mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) merupakan industri yang tak lepas dari ancaman keselamatan dan kesehatan pekerja. Potensi kecelakaan terpusat pada kebakaran dan ledakan akibat adanya hubungan arus pendek dan trafo yang bertegangan tinggi pada proses produksi. SMK3 yang diterapkan oleh PT Indonesia Power sudah dianggap layak dalam

mengurangi resiko kecelakaan kerja. Tetapi dalam penerapan sehari-hari belum semua karyawan mendukung adanya system K3 dan menaati peraturan yang sudah ditetapkan.

Manajemen Risiko adalah salah satu bagian dari manajemen yang merupakan metode yang tersusun secara sistematis dan logis dalam pengawasan risiko dan tindakan perlindungan atas kemungkinan timbulnya kerugian karena adanya risiko. Menurut Djojosoedarso, (2005) fungsi pokok manajemen risiko adalah yang pertama menemukan kerugian potensial, mengevaluasi kerugian potensial, dan memilih cara yang tepat atau menentukan suatu kombinasi dari teknik-teknik yang tepat

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Indonesia Power Unit Pembangkit Mrica masih belum terlaksana secara optimal. Hal ini bisa menyebabkan munculnya potensi – potensi baru dalam kecelakaan kerja. Untu itu hal ini perlu ditindak lanjuti dengan menganalisis dan mengevaluasi SMK3 yang ada di perusahaan. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui penerapan SMK3 pada PT Indonesia Power UP Mrica, untuk mengetahui permasalahan dalam penerapan SMK3, dan mendapatkan solusi dari masalah tersebut.

2. Bahan dan Metode Penelitian

2.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 menurut OHSAS 18001:2007 adalah semua kondisi dan factor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja maupun orang lain (kontraktor, pemasok, pengunjung dan tamu) di tempat kerja. menurut America Society of Safety and Engineering (ASSE) K3 diartikan sebagai bidang kegiatan yang ditunjukkan untuk mencegah semua jenis kecelakaan yang ada kaitannya dengan lingkungan dan situasi kerja. Pengertian K3 menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No Kep. 463/MEN/1993 adalah keselamatan dan kesehatan kerja adalah upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lainnya ditempat erja/perusahaan selalu dalam keadaan selamat dan sehat, serta agar setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien.

Tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja menurut Suma'mur (2009) adalah sebagai berikut :

- a. Melindungi tenaga kerja atas hak keselamatan dan melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional
- b. Menjamin keselamatan setiap orang yang berada di tempat kerja
- c. Sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman

2.2 Sistem Manajemen Keesehatan dan Keselamatan Kerja

System Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau yang biasa disingkat menjadi SMK3 menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah bagian dari system manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.. SMK3 diterapkan pada perusahaan dengan tujuan untuk mengurangi atau mencegah kecelakaan yang mengakibatkan cedera atau kerugian materi. Menurut OHSAS 18001 Fungsi Sistem Manajemen K3 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai alat manajemen
2. Sebagai agen pemenuhan persyaratan
3. Sebagai konsultan keselamatan
4. Sebagai pengendali rugi

Menurut PP Republik Indonesia No. 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Sistem Manajemen K3 mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi
2. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.
3. Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.

Sistem Manajemen K3 mempunyai beberapa manfaat, berikut ini adalah manfaat yang didapat jika menerapkan Sistem Manajemen K3 (Rudi Suardi, 2007)

1. Perlindungan karyawan
2. Memperlihatkan kepatuhan pada peraturan dan undang-undang
3. Mnegurangi biaya
4. Membuat system manajemen yang efektif
5. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan.

Menurut OHSAS 18001, sistem manajemen merupakan satu kesatuan untuk menetapkan kebijakan dan sasaran serta untuk mendapat objektif tersebut. Sistem manajemen K3 terdiri atas 2 (dua) unsur pokok yaitu proses manajemen dan implementasinya. Proses SMK3 menjelaskan bagaimana sistem manajemen tersebut dijalankan atau digerakkan. Sistem Manajemen K3 dimulai dengan penetapan kebijakan K3 oleh manajemen puncak sebagai perwujudan komitmen manajemen dalam mendukung penerapan K3. Kebijakan K3 selanjutnya dikembangkan dalam perencanaan. Tanpa perencanaan yang baik, proses K3 akan berjalan tanpa arah (misguided), tidak efisien, dan tidak efektif.

2.3 Metodologi Penelitian

Dalam penulisan ini hal yang pertama dilakukan adalah melakukan pengamatan secara langsung dan

mengamati sejauh mana penerapan SMK3 pada PT Indonesia Power UP Mrica Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui penerapan SMK3 di dalam perusahaan, mengetahui permasalahan mengenai SMK3 dan memberikan solusi pada masalah tersebut.

Studi literatur dilakukan untuk mencari referensi untuk penulisan penelitian dan sebagai pembandingan pada studi lapangan. Referensi didapatkan dari berbagai jurnal dan buku-buku dengan tema yang berkaitan dengan penelitian agar dasar ilmu mendukung untuk melakukan penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara secara langsung karyawan dan pihak yang berkaitan dengan topik yang diangkat pada penelitian ini. Wawancara dilakukan langsung dan pertanyaan bersifat bebas dan terbuka. Responden yang dipilih adalah ahli K3, staff divisi operasional, dan staff pemeliharaan. Pengamatan dilakukan dengan melakukan peninjauan langsung ke objek penelitian.

Dari hasil pengumpulan data dilakukan analisis dan didapatkan hasil pembahasan secara menyeluruh yang akan menjawab rumusan masalah yang telah tersusun. Pada pembuatan laporan ini analisis yang dilakukan adalah tentang penerapan system manajemen K3).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada PT Indonesia Power UP Mrica

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 tahun 2012 tentang penerapan system manajemen keselamatan dan kesehatan kerja bahwa system manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah bagian dari system manajen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif dan pada pasal 5 dikatakan bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya jika mempekerjakan pekerja paling sedikit 100 atau mempunyai tingkat potensi bahaya yang tinggi.

Dengan adanya peraturan pemerintah tersebut maka PT Indonesia Power sudah menerapkan SMK3 pada perusahaannya. Penerapan SMK3 pada perusahaan sudah terbilang cukup baik namun masih terdapat beberapa kekurangan yang dapat ditingkatkan. Di PT Indonesia Power juga sudah menerapkan Sistem Manajemen Terintegrasi ISO 9001:2008 dan ISO 14001:2004. ISO 9001 adalah standar system manajemen mutu dan ISO 14001 adalah spesifikasi internasional untuk system manajemen lingkungan yang membantu dalam mengidentifikasi, memprioritaskan, dan mengatur resiko lingkungan sebagai bagian dari praktik bisnis normal. Sayangnya di PT Indonesia Power belum menerapkan OHSAS (Occupational Health and Safety Assesment Series) 18001 yang merupakan standar internasional untuk penerapan Sistem Manajemen Kesehatan & Keselamatan Kerja (SMK3)

3.2 Tabel Rekap Efektifitas Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3 PT Indonesia Power UP Mrica

Pada tabel 1 dapat dilihat poin-poin yang terdapat pada penerapan SMK3 di PT Indonesia Power UBP Semarang. Tabel tersebut menjelaskan apakah poin – poin yang disebutkan diatas memenuhi syarat dalam penerapan di lingkungan kerja. Masih terdapat banyak point – point yang tidak cukup memenuhi persyaratan, poin tersebut dianggap tidak memenuhi karena kurangnya bukti (evidence) dalam penerapan poin tersebut atau bukti (evidence) yang sudah dianggap tidak layak karena belum diperbaharui. Pada hasil Checklist ditemukan 11 poin yang tidak memenuhi persyaratan. Total persen pemenuhan pada keamanan bekerja dalam SMK3 adalah 76%. Angka ini masih dianggap cukup dan layak walaupun belum optimal

Tabel 1. Review Efektifitas SMK3

No	DESKRIPSI	Compliance			Evidence
		Ya	Tidak	N/A	
RENCANA STRATEGI K3					
1	Terdapat prosedur terdokumentasi untuk identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko K3.	v			Prosedur pemantauan dan pengukuran kinerja K3L dan pengamanan
2	Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko K3 sebagai rencana strategi K3 dilakukan oleh petugas yang berkompeten.	v			Belum ada evidence
3	Rencana strategi K3 sekurang-kurangnya berdasarkan tinjauan awal, identifikasi potensi bahaya, penilaian, pengendalian risiko, dan peraturan perundang-undangan serta informasi K3 lain baik dari dalam maupun luar perusahaan.	v			PMK3LP 2015

Lanjutan Tabel 1. Review Efektifitas SMK3

No	DESKRIPSI	Ya	Tidak	N/A	Evidence
4	Rencana strategi K3 yang telah ditetapkan digunakan untuk mengendalikan risiko K3 dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat diukur dan menjadi prioritas serta menyediakan sumber daya.	v			DIDC Identifikasi potensi bahaya,HIRARC 2015, Prosedur pemantauan dan pengukuran kinerja K3L dan pengamanan
5	Rencana kerja dan rencana khusus yang berkaitan dengan produk, proses, proyek atau tempat kerja tertentu telah dibuat dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat diukur, menetapkan waktu pencapaian dan menyediakan sumber daya.	v			PMK3LP 2015
6	Rencana K3 diselaraskan dengan rencana sistem manajemen perusahaan.		v		Belum ada evidence
SISTEM KERJA					
1	Petugas yang kompeten telah mengidentifikasi bahaya, menilai dan mengendalikan risiko yang timbul dari suatu proses kerja.	v			Safety plan PM Maximo
2	Apabila upaya pengendalian risiko diperlukan, maka upaya tersebut ditetapkan melalui tingkat pengendalian.		v		Belum ada evidence
3	Terdapat prosedur atau petunjuk kerja yang terdokumentasi untuk mengendalikan risiko yang teridentifikasi dan dibuat atas dasar masukan dari personil yang kompeten serta tenaga kerja yang terkait dan disahkan oleh orang yang berwenang di perusahaan.	v			Investigasi ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan pencegahan, prosedur penanganan kecelakaan dan PAK
4	Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, standar serta pedoman teknis yang relevan diperhatikan pada saat mengembangkan atau melakukan modifikasi atau petunjuk kerja.		v		Belum ada evidence
5	Terdapat sistem ijin kerja untuk tugas berisiko tinggi.	v			Safety Permit
6	Alat pelindung diri disediakan sesuai kebutuhan dan digunakan secara benar serta selalu dipelihara dalam kondisi layak pakai.	v			Belum ada evidence
7	Alat pelindung diri yang digunakan dipastikan telah dinyatakan layak pakai sesuai dengan standar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.	v			Belum ada evidence
8	Upaya pengendalian risiko dievaluasi secara berkala apabila terjadi ketidaksesuaian atau perubahan pada proses kerja.		v		Belum ada evidence
PEMELIHARAAN, PERBAIKAN, DAN PERUBAHAN SARANA PRODUKSI					
1	Penjadualan pemeriksaan dan pemeliharaan sarana produksi serta peralatan mencakup verifikasi alat- alat pengaman dan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundangan, standar dan pedoman teknis yang relevan	v			Belum ada evidence
2	Semua catatan yang memuat data-data secara rinci dari kegiatan pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan, dan perubahan-perubahan yang dilakukan atas sarana dan peralatan produksi harus disimpan dan dipelihara		v		Belum ada evidence
3	Sarana dan peralatan produksi memiliki sertifikat yang masih berlaku sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dan standar		v		Belum ada evidence
4	Pemeriksaan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan, dan setiap perubahan harus dilakukan petugas yang kompeten dan berwenang	v			Belum ada evidence
5	Terdapat prosedur untuk menjamin bahwa jika terjadi perubahan terhadap sarana dan peralatan produksi, perubahan tersebut harus sesuai dengan persyaratan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan	v			Belum ada evidence

Lanjutan Tabel 1. Review Efektifitas SMK3

No	DESKRIPSI	Ya	Tidak	N/A	Evidence
6	Terdapat prosedur permintaan pemeliharaan sarana dan peralatan produksi dengan kondisi K3 yang tidak memenuhi persyaratan dan perlu segera diperbaiki	v			Belum ada evidence
7	Terdapat sistem untuk penandaan bagi peralatan yang sudah tidak aman lagi untuk digunakan atau sudah tidak digunakan	v			List Chain Blocks
8	Apabila diperlukan dilakukan penerapan sistem penguncian pengoperasian (lock out system) untuk mencegah agar sarana produksi tidak dihidupkan sebelum saatnya	v			Prosedur LOTO
9	Terdapat prosedur yang dapat menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja atau orang lain yang berada di dekat sarana dan peralatan produksi pada saat proses pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan	v			Pemeliharaan rutin, pemeliharaan periodeik, pemeliharaan korektif dan emergency
10	Terdapat penanggung jawab untuk menyetujui bahwa sarana dan peralatan produksi telah aman digunakan setelah proses pemeliharaan, perawatan, perbaikan atau perubahan		v		Belum ada evidence
PENGAWASAN					
1	Dilakukan pengawasan untuk menjamin bahwa setiap pekerjaan dilaksanakan dengan aman dan mengikuti setiap prosedur dan petunjuk kerja yang telah ditentukan.	v			Belum ada evidence
2	Setiap orang diawasi sesuai dengan tingkat kemampuan mereka dan tingkat risiko tugas.	v			Belum ada evidence
3	Pengawas/Penyelia ikut serta dalam identifikasi bahaya dan membuat upaya pengendalian.	v			Belum ada evidence
4	Pengawas/ Penyelia diikutsertakan dalam melakukan penyelidikan dan pembuatan laporan terhadap terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta wajib menyerahkan laporan dan saran-saran kepada pengusaha atau pengurus.	v			Belum ada evidence
5	Pengawas/Penyelia ikut serta dalam proses konsultasi		v		Belum ada evidence
SELEKSI DAN PENEMPATAN PERSONIL					
1	Persyaratan tugas tertentu, termasuk persyaratan kesehatan diidentifikasi dan dipakai untuk menyeleksi dan penempatan tenaga kerja.	v			Perencanaan SDM
2	Penugasan pekerjaan harus berdasarkan pada kemampuan dan ketrampilan serta kewenangan yang dimiliki.	v			Perencanaan SDM
AREA TERBATAS					
1	Pengusaha atau pengurus melakukan penilaian risiko lingkungan kerja untuk mengetahui daerah-daerah yang memerlukan pembatasan izin masuk	v			Kriteria area ABCD
2	Terdapat pengendalian atas daerah/tempat dengan pembatasan izin masuk	v			Kriteria area ABCD
3	Tersedianya fasilitas dan layanan di tempat kerja sesuai dengan standar dan pedoman teknis	v			Belum ada evidence
4	Rambu-rambu K3 harus dipasang sesuai dengan standar dan pedoman teknis		v		Belum ada evidence
KESIAPAN UNTUK MENANGANI KEADAAN DARURAT					
1	Keadaan darurat yang potensial di dalam dan/atau di luar tempat kerja telah diidentifikasi dan prosedur keadaan darurat telah didokumentasikan dan diinformasikan agar diketahui oleh seluruh orang yang ada di tempat kerja	v			Belum ada evidence

Lanjutan Tabel 1. Review Efektifitas SMK3

No	DESKRIPSI	Ya	Tidak	N/A	Evidence
2	Penyediaan alat/sarana dan prosedur keadaan darurat berdasarkan hasil identifikasi dan diuji serta ditinjau secara rutin oleh petugas yang kompeten dan berwenang	v			Belum ada evidence
3	Tenaga kerja mendapat instruksi dan pelatihan mengenai prosedur keadaan darurat yang sesuai dengan tingkat risiko	v			Belum ada evidence
4	Petugas penanganan keadaan darurat ditetapkan dan diberikan pelatihan khusus serta diinformasikan kepada seluruh orang yang ada di tempat kerja	v			Belum ada evidence
5	Instruksi/prosedur keadaan darurat dan hubungan keadaan darurat diperlihatkan secara jelas dan menyolok serta diketahui oleh seluruh tenaga kerja di perusahaan		v		Belum ada evidence
6	Peralatan, dan sistem tanda bahaya keadaan darurat disediakan, diperiksa, diuji, dan dipelihara secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan	v			Laporan preventive maintenance fire fighting UP Mrica
7	Jenis, jumlah, penempatan dan kemudahan untuk mendapatkan alat keadaan darurat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau standat dan dinilai oleh petugas yang berkompeten dan berwenang		v		Belum ada evidence
PELAYANAN					
1	Apabila perusahaan dikontrak untuk menyediakan pelayanan yang tunduk pada standar dan peraturan perundang-undang mengenai K3, maka perlu disusun Prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan memenuhi persyaratan	v			Belum ada evidence
2	Apabila perusahaan diberi pelayanan melalui kontrak, dan pelayanan tunduk pada standar dan peraturan perundang-undangan K3, maka perlu disusun prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan memenuhi persyaratan	v			Belum ada evidence
PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN (P3K)					
1	Perusahaan telah mengevaluasi alat P3K dan menjamin bahwa sistem P3K yang ada memenuhi peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis	v			Belum ada evidence
2	Petugas P3K telah dilatih dan ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan	v			Belum ada evidence
TOTAL		35	11		

4. Kesimpulan

Pada PT Indonesia Power UBP Mrica telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 tahun 2012 tentang penerapan system manajemen keselamatan dan kesehatan kerja bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya jika mempekerjakan pekerja paling sedikit 100 atau mempunyai tingkat potensi bahaya yang tinggi. Dalam penerapannya perusahaan ini juga telah memebentuk P2K3. P2K3 akan mengadakan rapat rutin setiap 1 bulan sekali. Tim audit K3 akan memeriksa kinerja bagian K3 di perusahaan secara rutin yaitu 6 bulan sekali. Pendokumentasian akan dilakukan secara berkala tetapi tidak menyeluruh dikarenakan jumlah SDM yang

sedikit. Secara keseluruhan bagian K3 sudah melakukan penerapan SMK3 dengan baik, namun pada karyawan masih banyak yang enggan untuk bergabung dalam menerapkan K3 di daerah kerja, dimana masih terdapat kelalaian yang dianggap sepele tetapi sebenarnya membahayakan

Dalam penerapan SMK3 di PT Indonesia Power terdapat beberapa masalah yang dihadapi, seperti kurangnya SDM dalam melakukan inspeksi, pengawasan serta pendokumentasian pada seluruh area perusahaan. Karena kurangnya pengawasan pada area kerja maka penanggulangan untuk masalah yang ada akan lambat untuk diproses dan mengakibatkan meningkatnya risiko kecelakaan. Kurangnya pendokumentasian akan mengakibatkan kesusahan dalam melihat dan

menganalisis kejadian-kejadian yang berpengaruh pada kinerja karyawan dan berpengaruh pada perusahaan.

Untuk mengatasi masalah – masalah tersebut dapat dilakukan peningkatan konsolidasi, dan koordinasi kepada sesama karyawan agar penerapan SMK3 berjalan dengan baik. Dilakukan dokumentasi kecelakaan kerja dan dilakukan sosialisasi agar karyawan melapor ketika mengalami kecelakaan kerja supaya sumber kecelakaan dapat dianalisis dan diatasi dengan baik. Pihak manajerial sebaiknya memeriksa secara merata di seluruh kawasan perusahaan agar tempat-tempat yang tidak terlihat seperti area boat house tetap mendapat pengawasan, karena saat melakukan inspeksi APAR disana terdapat bahan B3 yaitu bensin dan disimpan didalam lemari kayu dan tempat sangat tidak terawat padahal disana terdapat beberapa pekerja yang bertanggung jawab atas tempat tersebut. Dilakukan tindakan perbaikan secepatnya ketika terdapat bagian pembangkit yang rusak, karena saat dilakukan pemeriksaan APAR terdapat kebocoran ada katup utama (Main Inlet Valve) dan area sekitar jadi tergenang air, walaupun sudah dilakukan pencegahan kecelakaan seperti dilakukan pelapisan plastic pada pengontrol di dekat katup utama agar tidak terkena air dan berakibat korslet. Dan sebaiknya dilakukan sertifikasi OHSAS 18001 agar citra perusahaan semakin baik dan karyawan selalu terjamin akan keselamatan dan kesehatannya.

Daftar Pustaka

- Djojosoedarso, Soeisno. (2005). *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko Dan Asuransi*, Salemba Empat, Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)., diakses 18 Januari 2017
- Suma'mur. (2009). *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*. Jakarta. CV Haji Masagung,
- Suardi, Rudi (2007). *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta: PPM.